

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia. 2) Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah 1) Bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia? 2) Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia?. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2) Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri di Indonesia setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum oleh aparat penegak hukum yaitu Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri. Untuk permasalahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan siri oleh Penuntut Umum dalam tuntutan ada yang menuntut perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam aturan umum dan ada pula yang menuntut perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan dalam aturan khusus. Begitu pula dengan Majelis Hakim dalam putusannya Terdakwa ada yang dipidana berdasarkan ketentuan dalam aturan umum dan ada pula yang dipidana berdasarkan ketentuan dalam aturan khusus. Setelah diteliti dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ditemukan batasan khusus mengenai perbuatan tindak pidana kekerasan dalam perkawinan siri dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan dalam aturan umum atau ketentuan dalam aturan khusus. Rekomendasi kepada: 1) Pemerintah agar memformulasikan kembali mengenai pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan karena pengertian perkawinan tersebut berhubungan pula dengan penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. 2) Agar pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menanggapi permasalahan kekerasan yang terjadi dalam perkawinan siri.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan Siri

CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE IN UNREGISTERED MARRIAGES IN INDONESIA

ABSTRACT

The objectives of the study are 1) To find out and analyze positive legal regulations for criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia. 2) To find out the application of law to criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia. With this aim, the issues discussed are 1) What are the positive legal regulations for criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia? 2) How is the law applied to criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia? With this problem formulation, the research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the research show that: 1) The legal regulation of criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia is regulated in the Criminal Code, Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the Act of the Republic Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. 2) Application of the law to criminal acts of domestic violence in unregistered marriages in Indonesia. After research was conducted, it was found that there were different views regarding the application of the law by law enforcement officials, namely the Public Prosecutor and the Panel of Judges, in resolving a criminal act of domestic violence in unregistered marriages. In the case of criminal acts of domestic violence in unregistered marriages, the Public Prosecutor in his prosecution claims that the Defendant's actions have fulfilled the provisions of the general rules and there are also those who have claimed that the Defendant's actions have fulfilled the provisions of the special rules. Likewise, the Panel of Judges in their decision found some defendants who were sentenced based on the provisions in the general rules and some who were sentenced based on the provisions in the special rules. After examining the considerations of the Panel of Judges, no specific limitations were found regarding criminal acts of violence in unregistered marriages which could be categorized as having fulfilled the provisions in the general rules or the provisions in the special rules. Recommendations to: 1) Policy makers, to reformulate the definition of marriage in the Marriage Law because the definition of marriage is also related to the implementation of Act of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. 2) For the government to increase public awareness in responding to the problem of violence that occurs in unregistered marriages.

Keywords : *Criminal Act, Domestic Violence, Unregistered Marriages*